

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sistem dari kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu sehingga barang dan jasa yang diproduksi akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya meliputi beberapa interaksi dari komponen sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain yang bersangkutan. Suatu Pertumbuhan harus mencerminkan perubahan secara total masyarakat atau kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara sosial, maupun material (Todaro, 2011). Pertumbuhan ekonomi menginformasikan sampai sejauh mana perkembangan dari aktivitas perekonomian yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu, sehingga Pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam suatu proses pertumbuhan baik negara maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai peran penting terhadap kesuksesan ekonomi nasional, karena apabila target perekonomian didaerah terpenuhi maka perekonomian nasional akan ikut meningkat sebab daerah merupakan dasar dari terbentuknya suatu negara. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri akan diproksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah tambahan nilai barang dan jasa yang diproduksi dari

seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam periode tertentu. pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari keberhasilan mengelola pendapatan pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien.

Dana transfer yang diterima pemerintah daerah merupakan pembagian yang harus diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang yang disebut otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah suatu kebijakan tentang pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan ke daerah guna untuk mengatasi ketimpangan serta ketidak merataan keuangan antar daerah yang ada di Indonesia.

Indonesia yang sampai saat ini memiliki 34 provinsi yang berlatar belakang dan sumber pendapatan daerah berbeda-beda tentu akan menimbulkan kecemburuan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2016 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun dengan persentase pertumbuhan 5,02%. tahun 2017 mengalami peningkatan Rp 13.588,8 dengan persentase

5,07% lebih tinggi dari pencapaian pada tahun 2016. Struktur ekonomi secara spasial baik tahun 2016 maupun 2017 didominasi oleh prov DKI Jakarta yang mengalami pertumbuhan tertinggi 17,19 sampai 17,43% sedangkan provinsi Aceh mengalami penurunan dari 1,08% ke angka 1,06%. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan pada sektor konstruksi dan perdagangan yang awalnya masih tumbuh positif 2,71% lalu mengalami penurunan di angka 2,58%. Disisi lain pembiayaan pemerintah yang bersumber dari APBN juga mengalami penurunan dari Rp 3.08 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 2.62 triliun di tahun 2017. Penurunan-penurunan pada sektor utama pembiayaan pertumbuhan yang dialami provinsi Aceh membuat provinsi ini terdapat di urutan terendah dalam siklus pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tercapai apabila pemerintah mampu mengelola Sumber-sumber daya yang ada dengan semestinya sesuai dengan anggaran dan agenda pemerintahan, sehingga variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berasaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, PAD merupakan salah satu basis pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah selaku pendapatan inti diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan diatas juga didukung oleh Hasil penelitian Rahma dan Zein (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Namun berbeda dengan Dewi dan Suputra (2017), yang menemukan bahwa PAD negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka taraf keterkaitan fiskal daerah ke pusat akan berkurang, dan daerah akan lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan agenda daerahnya guna untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik.

Berasaskan UU No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang pengalokasiannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejalan dengan hasil penelitian Oktafia dkk (2018), DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Dewi dan Suputra (2017), menunjukkan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin besar proporsi DAU yang diterima pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat maka semakin besar pula prospek pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pembiayaan guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dana Bagi Hasil berasaskan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN dimana penganggarnya berdasarkan

angka persentase guna untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. Sumber pendapatan DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak (SDM). Sejalan dengan hasil penelitian Rahmah dan Zein (2016), yang menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. berbeda pendapat dengan Saleh (2017), DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan demikian semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah maka DBH yang didapat juga akan besar yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, DAK adalah dana transfer yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan serta urusan khusus daerah sesuai dengan keperluan nasional. Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah selanjutnya akan disalurkan pada kegiatan perbaikan, pembangunan, pengadaan, dan peningkatan sarana prasarana fisik dengan periode ekonomi yang panjang. Selaras dengan Oktafia dkk (2018), menyatakan DAK berpengaruh terhadap PDRB pada pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Timur. Berbeda dengan Dewi dan Suputra (2016), yang memiliki hasil penelitian bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena DAK cenderung akan

menambah aset tetap pemerintah daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berasaskan pada PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang pada hakikatnya akan menambah aset maupun kekayaan daerah seperti peralatan, infrastruktur, serta harta tetap lainnya dengan masa manfaat melebihi satu tahun anggaran. Belanja modal memiliki peran yang penting dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena melalui belanja modal pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur guna untuk pelayanan publik. Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian Nopiani dkk (2016), belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dewi dan Suputra (2017), menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah.

Indeks pembangunan manusia (IPM), merupakan suatu indeks yang pendekatannya untuk mengukur tingkat keberhasilan manusia. Todaro (2011), dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya investasi modal manusia. Investasi modal manusia yang dimaksudkan adalah investasi pendidikan dan kesehatan karena jika seseorang manusia dinyatakan sehat dan berpendidikan maka diharapkan mampu untuk mengelola dan menangkap potensi sumber daya yang ada, sehingga akan memperoleh pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat setempat. Sejalan dengan Kristina (2017), IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi Jawa Timur. Namun Muqorrobin dan Ady (2017), IPM berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat untuk dapat berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan produktivitas dan kreatifitas mereka.

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada Rahmah dan Zein (2016), peneliti menggunakan tiga tambahan variabel independen yaitu variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga total variabel yang dibahas sebanyak enam variabel. Selain mengembangkan penelitian yang dilakukan Rahmah dan Zein (2016), ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu juga melatar belakangi penelitian ini. Pada penelitian ini, seluruh provinsi yang ada di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena dilihat dari sisi geografis indonesia yang memiliki 34 provinsi dimana tiap-tiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga akan menimbulkan kecemburuan serta ketidak merataan antar daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi ketidak merataan tersebut maka pemerintah pusat akan melakukan transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana yang telah diperoleh pemerintah daerah baik dari hasil pengelolaan daerah maupun dari transfer pemerintah pusat akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

infrastruktur, sarana prasarana untuk memenuhi mutu dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian sebelumnya masih berfokus pada tingkat provinsi dan kota saja.

Berdasarkan uraian diatas dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “ **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA** “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagaiberikut:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah BM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
6. Apakah IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, dan BM serta IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik PAD, DAU, DBH, DAK, BM, dan IPM serta hubungannya terhadap pertumbuhan skonomi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan refrensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah–masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap sejalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BABV SIMPULAN DAN DATA

Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan bab IV, serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.